

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

Oleh:

Aurely Kartika Sari¹

Silvia Maharani Dewi²

M Noer Falaq Al Amin³

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur (60231)

Korespondensi Penulis: aurely.22072@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The relocation of the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan is becoming a hot topic of discussion among the public. Despite the government's efforts to expand economic equality and reduce the gap between Java and outside Java, public opinion is divided between those who support and oppose the decision to this transfer. This research uses a qualitative descriptive approach with Fishbone Analysis Diagrams to analyze the urgency of IKN movement. Various literature, including academic journals and expert views, are used to support this analysis. The research results highlight the importance of considering Man, Environment, Material, Method and Money aspects in making decisions regarding the transfer of IKN.*

Keywords: *Decision-making, Fishbone Analysis, Transfer of National Capital.*

Abstrak. *Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi topik hangat dalam diskusi publik. Sementara pemerintah berupaya untuk memperluas pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pendapat masyarakat terbagi antara yang mendukung dan menentang keputusan pemindahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan diagram *Fishbone Analysis* untuk menganalisis urgensi pemindahan IKN. Berbagai literatur, termasuk jurnal akademik dan pandangan para ahli, digunakan*

Received May 08, 2024; Revised May 11, 2024; May 23, 2024

*Corresponding author: aurely.22072@mhs.unesa.ac.id

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

untuk mendukung analisis ini. Hasilnya, menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek *Man, Environment, Material, Method, dan Money* dalam mengambil keputusan terkait pemindahan IKN.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Analisis *Fishbone*, Pemindahan Ibu Kota Negara.

LATAR BELAKANG

Ibu kota negara memegang peran penting sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ibu kota negara memiliki peran yang penting untuk menunjukkan karakter sebuah negara yaitu sebagai simbol kota untuk membedakan fungsi politik, ekonomi, dan budaya serta ibu kota juga sebagai tempat pusat pemerintahan negara yang menunjukkan kekuatan politik (Nurhermaya & Sugangga, 2021).

Kondisi ibu kota suatu negara sangat bervariasi tergantung pada konteks geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari negara tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan ibu kota mencerminkan identitas nasional suatu negara, dan seringkali dianggap sebagai simbol karakter nasional yang berakar pada sejarah panjang dan warisan budaya.

Sebagai pusat pemerintahan dan pusat administratif negara, ibu kota menjadi titik fokus bagi pembangunan yang signifikan. Sebagai pusat kegiatan politik, ibu kota sering dijadikan pusat pertemuan untuk lembaga-lembaga pemerintahan baik daerah, nasional, bahkan internasional. Sebagai pusat ekonomi, ibu kota menjadi pusat dan lokasi utama berbagai sektor bisnis, lembaga keuangan, serta industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dinamika kehidupan budaya di ibu kota cenderung berkembang dengan pesat, dengan adanya berbagai acara seni, festival, dan kegiatan budaya lainnya yang memperkaya kehidupan kota.

Walau demikian, beberapa ibu kota juga dihadapkan pada berbagai macam tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, kriminalitas, perbedaan sosial-ekonomi, dan banyak permasalahan lainnya yang perlu diatasi dengan penanganan yang tepat untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan kota tersebut serta negara secara keseluruhan. Yang menjadi permasalahan lainnya yaitu ketika sebuah kota mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang melewati batas maksimum maka yang akan terjadi adalah urbanisasi. Luas kota yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk,

semakin menyusahkan pemerintah dalam mengatur jumlah penduduk atau pertumbuhan kota. Hal ini dapat menyebabkan tingginya migrasi dari kota ke pinggiran kota.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara merupakan keputusan yang kompleks. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan pertimbangan dan analisis mendalam terhadap berbagai faktor strategis, yaitu faktor geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pemindahan ibu kota juga berpotensi untuk memiliki dampak signifikan yang berpengaruh terhadap infrastruktur negara, pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya, serta identitas nasional suatu negara. Implementasi keputusan ini seringkali membutuhkan investasi yang besar dan perencanaan jangka panjang yang bijak dan akurat untuk memastikan keberhasilan serta dampak positifnya terhadap negara yang bersangkutan.

Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan yang disampaikan, mengumumkan mengenai perpindahan ibu kota negara. Presiden secara resmi meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia yang baru, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Alasan rencana perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur karena risiko bencana di wilayah Kalimantan Timur sangat kecil dan wilayah tersebut diukur sudah cukup strategis di antara kota-kota yang berkembang, khususnya kota Balikpapan dan Samarinda. Proyek perpindahan ibu kota ini diharapkan dapat membantu mengembangkan beberapa sektor di wilayah Kalimantan Timur bahkan Indonesia (Hasibuan & Aisa, 2020).

Ibu kota baru terletak secara geografis pada titik tengah negara Indonesia yang dimana hal ini nantinya akan dapat dengan mudah terlaksananya pemerataan ekonomi sebagai tindak dalam proses pembaruan ekonomi yang tidak merata, di khususkan pada wilayah timur. Persiapan suatu kawasan tentu menjadi hal yang menentukan, karena nantinya kawasan di sekitarnya harus siap untuk dibangun ibu kota negara yang baru.

Kegiatan pemerintah dan dunia usaha yang saat ini berpusat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta, sudah membatasi perkembangan perekonomian di luar Pulau Jawa. Dan ketidakseimbangan antara wilayah secara keseluruhan ini telah mencegah bertumbuhnya ekonomi nasional. Dengan adanya rencana pemindahan IKN, pemerintah berkeinginan untuk dapat memperluas pemerataan ekonomi serta meminimalisir kesenjangan di Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa (Pribadi & Utomo, 2021). Maka dari

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

itu, tindak lanjut perencanaan awal untuk perpindahan Ibu Kota akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai kajian pemindahan IKN.

Disisi lain, pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa mempunyai beberapa risiko. Hal ini bersangkutan dengan persiapan di daerah tujuan dalam hal infrastruktur yang diperlukan untuk membantu pengendalian pemerintahan. Pemindahan ibu kota sendiri merupakan upaya untuk memindahkan atau menciptakan suatu ruang atau kawasan baru sebagai bagian dari pusat pemerintahan untuk mengalihkan ruang atau kawasan sebelumnya. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari suatu daerah ke daerah lain merupakan suatu keputusan yang penting karena memerlukan persiapan kelembagaan, sosial, dan anggaran yang tidak sedikit.

Ada 6 sektor industri yang akan dikembangkan di kawasan IKN, yaitu jasa kesehatan, farmasi, pendidikan, pariwisata, teknologi bersih (energi surya), serta industri perikanan nomor dan inovasi. Pengembangan sektor industri di kawasan ibu kota negara menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan penghijauan. Daerah Penajam Paser Utara diharapkan bisa memperlancar modal, barang dan jasa, serta arus penduduk dari wilayah maju ke wilayah yang terbelakang dan sebaliknya, yang bisa saling memberi pengaruh baik satu dengan yang lain supaya mewujudkan keseimbangan penyusunan daerah untuk ekonomi dan dapat menciptakan hilirisasi sumber daya alam di daerah pedalaman.

Pemindahan ibu kota juga tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, diatur didalamnya terkait proyek pemindahan ibu kota negara dengan poin substansi sebagai berikut :

1. Pembentukan Ibu Kota Negara di daerah kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru dan badan Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan DKI Kota Nusantara.
2. Pembentukan, kekhususan, kedudukan, cakupan wilayah, dan rencana induk.
3. Bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan.
4. Pembagian wilayah.

5. Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan.
6. Pemandahan kedudukan lembaga negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional.
7. Pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.
8. Partisipasi masyarakat.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah menjadi topik kontroversial yang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di tengah masyarakat. Keputusan ini mengundang berbagai macam opini dan perspektif dari berbagai kalangan. Sebagian menyambut keputusan ini dengan optimis, melihatnya sebagai peluang dan kesempatan untuk mengurangi tekanan urban yang semakin meningkat di Jakarta, serta potensi untuk mengembangkan wilayah baru di Kalimantan Timur. Mereka yakin keputusan ini akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan dalam jangka panjang bagi negara. Namun, sebagian pihak lainnya mengkhawatirkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul akibat relokasi besar-besaran ini, terutama terkait dengan adaptasi masyarakat lokal dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada. Mereka menyoroti kemungkinan kerugian bagi masyarakat lokal yang akan direlokasi, serta dampak negatif terhadap lingkungan alami yang sensitif di Kalimantan Timur. Selain itu, beberapa pihak juga mempertanyakan apakah infrastruktur dan kesiapan Kalimantan Timur sudah memadai untuk menjalankan peran sebagai ibu kota negara yang baru.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk aspek infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal, pemindahan ibu kota negara menjadi isu kompleks yang membutuhkan pendekatan dan kajian yang mendalam. Keputusan ini memerlukan evaluasi lebih lanjut serta kebijakan yang cermat untuk memastikan bahwa dampaknya secara keseluruhan memberikan kontribusi positif bagi negara secara keseluruhan. Hal tersebut nantinya menjadi pembahasan yang penting dan menarik mengenai bagaimana pemerintah mengambil keputusan terkait pemindahan ibu kota negara tersebut.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah, perumusan masalah tersebut terjadi di dalam masyarakat.

Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan dan sikap yang dipilih dan diambil demi kepentingan pelaku keputusan. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan setelah melalui proses pemilihan secara rasional dari beberapa alternatif pilihan yang sudah dibuat sebelumnya.

Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur atau komponen pengambilan keputusan. Unsur pengambilan keputusan itu, adalah :

1. Tujuan dari pengambilan keputusan;
2. Identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah;
3. Perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia; dan
4. Sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan (*decision-making*) menurut Kotler (2000) adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah, dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu keadaan.

- b. Pengumpulan dan analisis data, pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.
- c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.
- d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik, pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.
- e. Pelaksanaan keputusan, dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang akan dihasilkan, baik positif maupun negatif. Ketika menerima dampak negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.
- f. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan, setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat.

Fishbone Diagram Analysis

Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisis akar permasalahan dan mengetahui risiko dari suatu hal sejak awal. Dilansir dari laman Binus University, diagram tulang ikan atau *fishbone* diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau *cause effect* diagram. Penemunya adalah Professor Kaoru Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo, pada tahun 1943. Sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa.

Fungsi dasar diagram *Fishbone* (tulang ikan) adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. *Fishbone* diagram sendiri banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dan membantu menemukan ide-ide untuk solusi suatu masalah.

Dalam membuat *Fishbone* diagram, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain :

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

1. Mengidentifikasi masalah.

Identifikasikan masalah yang sebenarnya sedang dialami. Masalah utama yang terjadi kemudian digambarkan dengan bentuk kotak sebagai kepala dari *fishbone* diagram. Masalah yang diidentifikasi yang akan menjadi pusat perhatian dalam proses pembuatan *fishbone* diagram.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah.

Dari masalah yang ada, maka ditentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Faktor-faktor ini akan menjadi penyusun “tulang” utama dari *fishbone* diagram. Faktor ini dapat berupa sumber daya manusia, metode yang digunakan, cara produksi, dan lain sebagainya.

3. Menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor.

Dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah, maka perlu ditemukan kemungkinan penyebab. Kemungkinan-kemungkinan penyebab setiap faktor, akan digambarkan sebagai “tulang” kecil pada “tulang” utama. Setiap kemungkinan penyebab juga perlu dicari tau akar penyebabnya dan dapat digambarkan sebagai “tulang” pada tulang kecil kemungkinan penyebab sebelumnya. Kemungkinan penyebab dapat ditemukan dengan cara melakukan *brainstorming* atau analisa keadaan dengan observasi.

4. Melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat.

Setelah membuat *fishbone* diagram, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab yang sudah ditemukan, perlu dianalisa lebih jauh prioritas dan signifikansi dari penyebabnya. Kemudian dapat dicari tau solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar masalah.

Pemindahan Ibu Kota Negara

Telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Ibu Kota Negara bernama Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara

memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

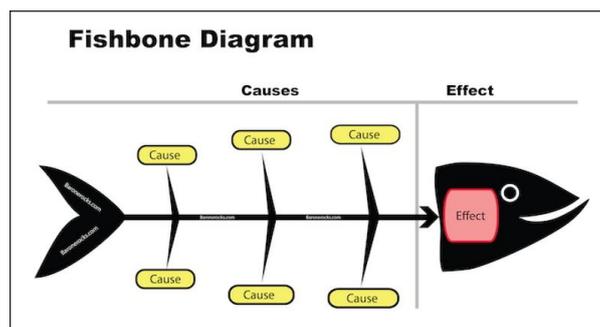
1. Menjadi kota berkelanjutan di dunia;
2. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
3. Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkompilasi berbagai sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder untuk menganalisis kebijakan pemindahan ibu kota dengan pendekatan *fishbone analysis*. Tulisan ini merujuk pada beberapa jurnal akademik, opini dan pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Gambar 1. Model Diagram *Fishbone Analysis*



Sumber : Quora.com (2021).

Mekanisme penggunaan diagram *Fishbone* dilakukan untuk menganalisis urgensi pemindahan ibu kota nusantara. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan rangkuman untuk memudahkan pembahasan. Pendekatan diagram *Fishbone Analysis* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan identifikasi masalah

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

menggunakan kategori *Man, Environment, Material, Method, and Money* sebagai kategori identifikasi masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jakarta menjadi pusat segala aspek kehidupan di Indonesia, selain sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, juga sebagai pusat perdagangan, keuangan, jasa, hiburan, olahraga, budaya, transportasi, dan penelitian. Sehingga tidak mengherankan dengan peran sebagai pusat berbagai aktivitas di Indonesia itu, Jakarta mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat.

Pesatnya urbanisasi di Jabodetabek ini ternyata tidak dapat diimbangi oleh tersedianya fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai, sehingga berbagai masalah seperti, banjir, kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh menjadi semakin sulit diatasi. Ketidakberdayaan Jakarta untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan seringkali dijadikan salah satu pertimbangan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, menyampaikan bahwa pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara hal ini karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.

Pertimbangan sosio-ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam memindahkan ibu kota khususnya untuk mengurangi ketimpangan wilayah di negara tersebut. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota baru dapat mengembangkan kawasan baru yang dapat mengurangi pemusatan kegiatan di lokasi ibu kota yang lama.

Tahap Pertama : Identifikasi dan Menetapkan Pernyataan Masalah

1. Aspek Man

a) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang ingin mengatasi masalah kepadatan penduduk dan distribusi ekonomi yang tidak merata. Dengan memindahkan ibu

kota nusantara maka akan memberikan dampak positif untuk perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber daya potensial di luar Jawa ini akan semakin maksimal. Sumber daya potensial di luar Jawa ini masih banyak yang belum dimanfaatkan secara baik. Dengan dekatnya lokasi pemerintah dan letak sumber daya ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemindahan ibu kota ini juga berpotensi untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar kelompok masyarakat dari segi pendapatan perkapita. Hal ini disebabkan sektor perekonomian masyarakat tidak terpusat di satu wilayah tertentu saja. Dengan begitu, dari menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

b) Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pemindahan ibu kota dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan SDM lokal di Kalimantan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat untuk mengisi berbagai posisi dalam administrasi pemerintahan, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang mendukung keberhasilan ibu kota baru. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada Jakarta dan membantu dalam redistribusi sumber daya ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Aspek Environment

a) Bencana Alam

Jakarta yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, memicu kekhawatiran sehingga ibu kota dipindahkan. Banjir yang sering terjadi di Jakarta tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas wilayah tersebut. Dampak ekonomi jangka panjang dari kerugian akibat banjir, seperti kerusakan infrastruktur dan kerugian bisnis, dapat memberi insentif bagi pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang dengan memindahkan ibu kota ke wilayah yang lebih aman secara alamiah. Kalimantan, dengan topografi dan kondisi alam yang berbeda, mungkin lebih tahan terhadap bencana seperti banjir dan penurunan tanah, memberikan stabilitas jangka panjang bagi pemerintahan dan perekonomian Indonesia.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

b) Ketersediaan Lahan

Keterbatasan lahan di Jakarta telah menyebabkan pembangunan yang tidak terkendali, termasuk pembangunan di daerah rawa dan daerah aliran sungai. Hal ini menyebabkan masalah banjir yang serius di musim hujan serta subsiden atau penurunan permukaan tanah yang terus menerus. Pembangunan yang tidak terkontrol telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius di Jakarta, termasuk kerusakan hutan, penurunan kualitas udara, dan masalah sampah yang kronis. Ketersediaan lahan yang luas dan potensial untuk pengembangan di Kalimantan dapat menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi baru untuk ibu kota.

3. Aspek Material

a) Mengurangi Kepadatan Masyarakat di Jakarta

Setiap tahunnya, tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan, menyebabkan tekanan besar pada infrastruktur, sumber daya, dan lingkungan hidup. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat mengurangi tekanan ini dengan memindahkan sebagian besar fungsi administrasi pemerintah, bisnis, dan penduduk ke wilayah yang lebih luas dan kurang padat. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya. Pasalnya, sektor pemerintahan dan sektor industri tingkat nasional berpusat di Jakarta. Adanya pemindahan IKN ini tentu akan mengurangi tingkat kepadatan masyarakat. Nantinya, sektor industri bisa berpusat di Jakarta dan sektor pemerintahan di Kalimantan Timur. Dengan adanya pembangunan ini, masyarakat tidak hanya melihat Jakarta sebagai satu-satunya pilihan untuk mencari pekerjaan dan pendidikan yang berkualitas.

4. Aspek Method

a) Pemerataan Pembangunan untuk Wilayah Luar Pulau Jawa

Tingkat pembangunan untuk wilayah di luar pulau Jawa tidak mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Ketimpangan pembangunan ini tentu akan berdampak di sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Adanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan memberikan potensi pembangunan yang merata bagi wilayah luar pulau Jawa. Dengan begitu, seluruh

sektor baik kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Jawa dan luar Jawa tidak jauh berbeda.

5. Aspek Money

a) Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dengan menjadikan IKN sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa *multiplier effect* dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

b) Pemerataan Pembangunan Ekonomi

IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarkan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa.

c) Pembiayaan dan Anggaran

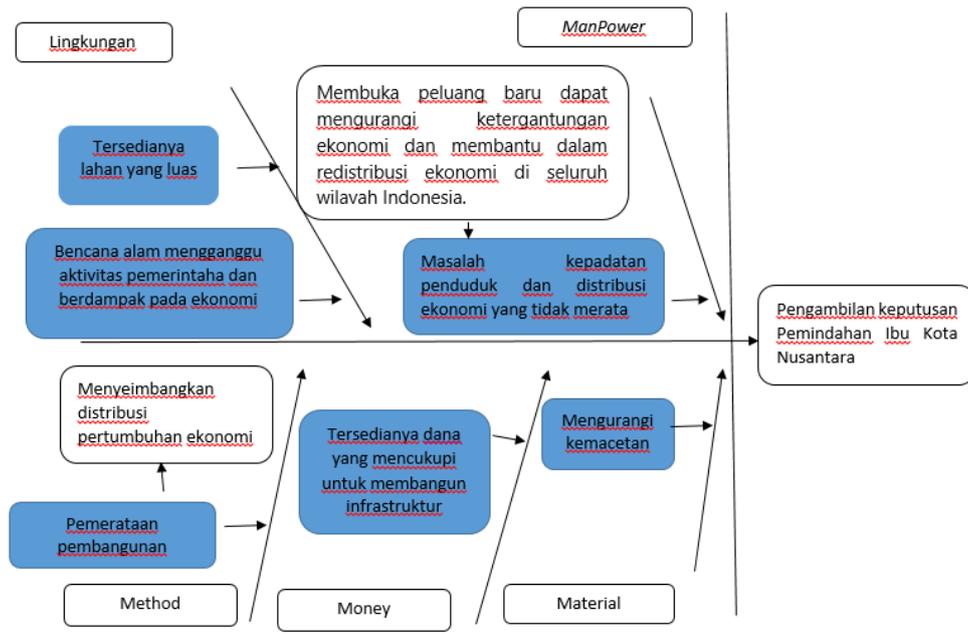
Tersedianya dana yang mencukupi untuk membangun infrastruktur baru dan mendukung pemindahan administrasi dari Jakarta ke Kalimantan.

Tahap Kedua : Penyusunan Diagram *Fishbone Analysis* Berdasarkan Identifikasi Permasalahan

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

Dengan menggunakan metode *fishbone diagram analysis*, dilakukan pemetaan permasalahan dari masing-masing aspek, yaitu aspek *method*, *manpower*, *material*, *environment*, dan *money* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. berikut.

Gambar 2. Ilustrasi Hasil Analisis Diagram *Fishbone* dalam Mengidentifikasi Akar Permasalahan



Sumber: Analisis dan Identifikasi Penulis (2024).

Tahap Ketiga : Menemukan Sebab Potensial (Akar Permasalahan)

Dari diagram *fishbone* yang disusun, maka sesuai teori *fishbone diagram analysis* tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menemukan sebab-sebab potensial sebagai akar permasalahan. Penetapan akar permasalahan utama akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Identifikasi Akar Permasalahan

Permasalahan	Akar Permasalahan	Area Penguatan
Infrastruktur di luar Jawa cenderung kurang berkembang dibandingkan dengan Jawa. Beberapa daerah terpencil masih memiliki akses yang terbatas ke fasilitas seperti jalan raya, listrik, dan air bersih.	Tidak Meratanya Pembangunan	Infrastruktur

Luar Jawa memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk tambang, gas alam, dan energi terbarukan. Namun, pengembangan sumber daya ini belum sepenuhnya dioptimalkan.	Potensi Sumber Daya Alam	Sumber Daya Alam
Pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan ekonomi di luar Jawa melalui program-program pembangunan dan investasi. Namun, tantangan seperti jarak yang jauh, keterbatasan akses, dan kurangnya ketersediaan tenaga kerja terampil masih menjadi hambatan.	Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah	Sumber Daya Manusia

Sumber: Analisis dan Identifikasi Penulis (2024).

Tahap Keempat : Solusi dan Rekomendasi

Setelah dilakukan penetapan akar permasalahan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi solusi dan rekomendasi terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara. Dengan menelaah hasil penetapan dan identifikasi akar permasalahan, diusulkan solusi dan rekomendasi dari permasalahan di atas :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dalam merencanakan, mendanai, dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa. Kolaborasi yang baik antara kedua tingkatan pemerintahan ini akan memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif.
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat dari pengembangan sumber daya alam adalah penting. Pemerintah dapat mendorong kemitraan antara perusahaan pengembang dan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang adil dari aktivitas tersebut.
3. Diperlukan pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah luar Jawa, terutama tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA DENGAN PENDEKATAN *FISHBONE ANALYSIS*

KESIMPULAN

Pembangunan atau proyek IKN sesungguhnya merupakan sebuah keputusan yang rasional dan sah untuk dilakukan oleh pemerintah, tetapi perlu alasan yang kuat dan jelas sebelum mengambil keputusan ini. Identifikasi objektif kondisi Jakarta saat ini oleh tim independen menjadi langkah awal, yang kemudian diikuti dengan kajian ilmiah untuk menentukan lokasi ibu kota baru. Variabel lain seperti pembiayaan dari APBN atau sumber daya lainnya juga perlu dievaluasi dengan saksama untuk menentukan prioritas dan kebutuhan.

Pemindahan ibu kota bukan hanya sekadar menciptakan representasi wilayah, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dengan dinamika pembangunan masa depan Indonesia guna menciptakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efisien serta pembangunan yang adil dan merata.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia memiliki pertimbangan dari berbagai aspek yaitu aspek *Manpower, Method, Material, Environment, dan Money*. Keputusan pemindahan ibu kota negara ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk mendukung pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas bangsa, serta diharapkan dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk dan permasalahan di ibu kota sebelumnya. Namun bagaimanapun, keberhasilan pemindahan ibu kota negara ini tergantung pada implementasi dan pengelolaan risiko yang baik dan bijak.

DAFTAR REFERENSI

- Alexandra, J. (2019). *Fishbone Analysis*. Binus University. Available at: <https://sis.binus.ac.id/2019/07/22/fishbone-analysis-2/>, diakses tanggal 29 Mei 2024.
- Ali, S.D. (2017). *Fishbone Diagram*. Binus University. Available at: <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>, diakses tanggal 29 Mei 2024.
- Aziz, A.S.R. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society. *Journal of Politics and Policy*, 5(2), 104-118.

<https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03>.

- Bappenas. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta. Diakses dari <https://jdih.bappenas.go.id/naskahakademik/detailnaskahakademik/2845>
- FISHBONE DIAGRAM / CAUSE EFFECT DIAGRAM. (2019). Retrieved from <https://bibingo.wordpress.com/2010/08/18/fishbone-diagram-cause-effect-diagram/>
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183–203. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>.
- Herdiana, D. (2020). Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Politika*, 11(1), 1-18. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.
- Kotler, P. (2000). *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 27–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>.
- Sahamony, A. A., Muta'ali, L., & Mei, E. T. W. M. (2020). Tinjauan Geografis Wilayah Potensial Ibukota Negara Indonesia. *Jurnal Teknosains*, 10(1), 86–101. <https://doi.org/10.22146/teknosains.36756>.
- Saputri, O. B., Nurul, H., & Mulawarman, H. (2022). Analisis Rencana Elektronifikasi Keuangan Daerah dalam Memperluas Kontribusi Zakat dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis. *AL-MUZARA'AH*, 10(1), 1-17. <https://doi.org/10.29244/jam.10.1.1-17>.
- Sriyono, A.R. (2024). DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM ASPEK GEOGRAFI, SOSIAL POLITIK, DAN EKONOMI. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 22-28. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15802](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15802).
- Susanto, I. (2019). Analisis Fishbone (Ishikawa Diagram). Retrieved from <http://cio-indo.blogspot.com/2011/11/analisis-fishbone-ishikawa-diagram.html>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.